



## LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

---

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibatalkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka peraturan perundang-undang ditingkat bawahnya yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang dimaksud secara yuridis juga untuk segera dibatalkan pemberlakuannya;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 260 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dipandang perlu untuk dibatalkan pemberlakuannya dan dicabut;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;